

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengalami krisis pandemi tercatat sejak tanggal 2 Maret 2020. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dikemukakan oleh badan medis nasional internasional yang ada di Wuhan, seperti yang dilansir dari berita harian CNN ¹. Gejala pertama yang dirasakan oleh 41 pasien pertama berupa gangguan pernapasan dan demam yang otomatis terkonfirmasi infeksi Covid-19 dan langsung dirawat di rumah sakit. Seketika itu, Tiongkok menerapkan kebijakan penutupan wilayah atau yang lebih dikenal dengan istilah *lockdown* di negaranya dan pada saat itu Tiongkok adalah negara yang paling tinggi angka terkonfirmasi di dunia. Kemudian, organisasi WHO (*World Health Organization*) menetapkan bahwa penyakit SARS-CoV-2 sebagai wabah yang menjadi permasalahan yang menjadi fokus utama kesehatan karena menyebar secara cepat ke seluruh negara. Setelah pertama kali terdeteksi di Indonesia yang diumumkan oleh pemerintah, pemerintah berupaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan penularan Covid-19, hal tersebut dilakukan karena dari adanya Covid-19 yang berpengaruh terhadap beberapa aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Perkembangan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah Indonesia, mengingat bahwa sampai hari ini Indonesia terus mengalami peningkatan pada jumlah kasus positif Covid-19 tersebut. Berikut merupakan data perkembangan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia,²

¹ CNN Indonesia, "Setahun Lalu Pasien Pertama Covid-19 Ditemukan Di Wuhan."

² Covid19.go.id, "Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per-Hari Di Indonesia."

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia

Bulan/ Tahun	Kasus Terkonfirmasi (Persentase Kenaikan)	Sembuh (Persentase Kenaikan)	Meninggal (Persentase Kenaikan)
2020 (akhir tahun)	743.198 (37,91%)	611.097 (35,64%)	22.138 (30,64%)
2021 (akhir tahun)	4.057.756 (445,98%)	4.048.638 (562,51%)	144.101 (550,92%)
Januari 2022	4.148.406 (2,23%)	4.074.761 (0,64%)	147.887 (2,62%)
Februari 2022	5.359.214 (29,18%)	4.783.722 (17,39%)	151.902 (2,715)
Maret 2022	5.998.953 (11,93%)	5.673.119 (18,59%)	154.641 (1,80%)
April 2022	6.021.642 (0,37%)	5.804.997 (2,32%)	155.809 (0,75%)
Mei 2022	6.054.633 (0,54%)	5.895.176 (1,55%)	156.586 (0,49%)
Juni 2022	6.086.212 (0,52%)	5.913.307 (0,30%)	156.731 (0,09%)
Juli 2022	6.207.098 (1,98%)	6.001.402 (1,48%)	156.993 (0,16%)
Agustus 2022	6.358.808 (2,44%)	6.156.034 (2,57%)	157.566 (0,36%)
September 2022	6.431.624 (1,14%)	6.255.918 (1,62%)	158.112 (0,34%)

Sumber: covid19.go.id/peta-sebaran (diolah oleh peneliti)

Menanggapi permasalahan fluktuasi jumlah kasus positif, jumlah orang yang sembuh, hingga jumlah kematian akibat Covid-19 yang selalu mengalami peningkatan angka di setiap bulannya. Bahkan, angka kasus positif yang terkonfirmasi mencapai hingga

lebih dari 6.000.000 jiwa, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pencegahan penularan Covid-19 dengan program-program, mulai dari 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker), penerapan PSBB/PPKM, hingga 3T (*testing, tracing, dan treatment*).

Program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memiliki beberapa peraturan-peraturan atau instruksi pemerintah tentang bagaimana masyarakat beraktivitas di tengah pandemi, seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Pasal 4 Ayat 1 Tahun 2020 perihal Pembatasan Sosial Berskala Besar (nama atau sebutan sebelum PPKM) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, peraturan tersebut meliputi,

1. meliburkan kegiatan di sekolah maupun tempat kerja
2. membatasi kegiatan keagamaan, seperti pembatasan jumlah jemaat di suatu rumah ibadah
3. membatasi segala kegiatan yang berhubungan dengan fasilitas umum maupun tempat-tempat lainnya³

Kemudian seiring berjalannya waktu, PSBB mulai diterapkan di seluruh wilayah Indonesia yang terdampak Covid-19 dan berganti nama menjadi PPKM seperti yang dilansir dari berita harian CNN Indonesia yang menerangkan perbedaan istilah PSBB dan PPKM dimana PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) merupakan inisiatif atau kebijakan dan pemerintah daerah, sedangkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) adalah kebijakan dari pemerintah pusat⁴. Peraturan terbaru yang ada di dalam PPKM mikro untuk tanggal 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021 antara lain,

³ Indonesia, "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA WRUS DISEASE 2019 (COVID-Ig)."

⁴ CNN Indonesia, "VIDEO: Pemerintah Ganti Istilah PSBB Menjadi PPKM."

Tabel 1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

No.	Aturan Terbaru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
1.	Kegiatan belajar dan mengajar di tingkat perguruan tinggi sudah boleh dilaksanakan secara <i>offline</i> atau tatap muka
2.	Kegiatan belajar dan mengajar di tingkat SMA/SMK tetap dilakukan secara <i>online</i>
3.	Aktivitas perkantoran sudah dapat dilakukan secara <i>Work From Office</i> (WFO) dengan kapasitas 50%
4.	Kegiatan pameran seni diizinkan dengan syarat kapasitas 25%
5.	Sektor esensial sudah boleh beroperasi 100%
6.	Pusat perbelanjaan atau mall dibuka hingga pukul 21.00 tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan
7.	Kafe dan tempat makan hanya memperbolehkan pengunjung sebanyak 50%
8.	Tempat ibadah sudah boleh didatangi dengan jumlah 50% dan tetap menerapkan protokol kesehatan
9.	Fasilitas umum yang tersedia hanya diperbolehkan sebanyak 50% sesuai peraturan daerah yang berlaku

sumber, berita harian kompas.com .⁵

Pada perkembangan PPKM tersebut, terdapat aturan mengenai pembatasan terhadap kegiatan belajar mengajar, baik di tingkat sekolah, maupun tingkat universitas. Hal

⁵ Dzulfaroh, "Diperpanjang, Ini Aturan Terbaru PPKM Mikro 23 Maret-5 April."

ini ditandai dengan pemberhentian proses belajar mengajar dengan cara tatap muka dan menggantinya dengan sistem belajar online. Belajar secara online atau pembelajaran jarak jauh ini sudah menjadi tren sekaligus menjadi suatu keharusan bagi bidang pendidikan mengingat mewabahnya Covid-19 di Indonesia, seperti yang tertulis pada berita pada Liputan6.com.⁶

Kemudian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan di Masa Pandemi Covid-19 yang mengintruksikan kepada setiap gubernur, wali kota, dan bupati di Indonesia untuk melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh dan memberhentikan segala kegiatan yang mengundang banyak kerumunan di sektor pendidikan dari tingkat terendah hingga ke perguruan tinggi.

Akan tetapi, pada pelaksanaannya, pembelajaran daring mengalami kendala seperti yang dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim. Dikutip dari berita harian CNBC Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan terdapat beberapa kendala yang dihadapi saat diterapkannya pembelajaran daring, diantaranya seperti jaringan internet yang buruk, perangkat yang tidak mendukung, serta fasilitas pembelajaran yang tidak memadai.⁷ Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melakukan survei pembelajaran dari rumah. Survei tersebut melibatkan sebanyak 237.193 responden mahasiswa kemudian sebesar 94,73% yang sudah melaksanakan pembelajaran daring.

⁶ Lisnawati, "Belajar Online Jarak Jauh Jadi Tren Selama Pandemi Corona."

⁷ CNBC Indonesia, "Menteri Nadiem Ungkap Kendala Pembelajaran Jarak Jauh."

Hasil Survei Pembelajaran Daring



Gambar 1.1 Hasil Survei Pembelajaran Daring

Sumber: *website* <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/89-persen-mahasiswa-tidak-suka-kuliah-daring-karena-masalah-internet?page=all>

Berdasarkan diagram hasil survei yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa banyak sekali mahasiswa yang lebih menyukai pembelajaran secara langsung karena terdapat biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk membeli kuota internet apabila harus kuliah secara daring⁸. Ditemukan juga bahwa mahasiswa mengeluarkan biaya untuk biaya koneksi internet bisa mencapai Rp.400.000 sebulannya dengan modus angka Rp. 100.000

Hasil survei selanjutnya menunjukkan data bahwa masih banyak ditemukan mahasiswa yang terkendala dalam melaksanakan pembelajaran daring

⁸ Lia Hutasoit, "89 Persen Mahasiswa Tidak Suka Kuliah Daring Karena Masalah Internet."

Hasil Survei Kesiapan Fasilitas Internet



Gambar 1.2 Hasil Survei Kesiapan Fasilitas Internet

Dari hasil survei mengenai kesiapan fasilitas internet yang dimiliki oleh mahasiswa, ditemukan sebesar 30,85% mahasiswa kurang siap dan sebesar 20,97% mahasiswa tidak mencukupi untuk melaksanakan perkuliahan secara daring.

Kendala yang dihadapi beberapa mahasiswa juga ada yang berupa keterbatasan kuota akibat dari mahalnya kuota internet, ditambah lagi kondisi ekonomi pada keluarga tersebut mengalami penurunan akibat dari pandemi Covid-19. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan kepada para murid, guru, dosen, dan mahasiswa berupa kuota internet yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembelajaran daring, seperti yang tertera pada website resmi Kemdikbud .⁹ Pelaksanaan pembelajaran daring tersebut juga mengalami kendala, seperti contoh pemberian bantuan kuota internet yang salah sasaran karena tidak ada kriteria ataupun regulasi yang baik untuk mengakses kuota

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Bantuan Kuota Data Internet."

internet tersebut dan masih ada mahasiswa yang tidak dapat mengaksesnya seperti yang tertulis di berita harian Kompas .¹⁰

Seorang pakar di bidang pendidikan asal Amerika Serikat, Michael W. Apple menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi saat melaksanakan perkuliahan daring seperti yang dilansir di *website* Kompasiana. Profesor dari University of Wisconsin-Madison School of Education itu mengatakan bahwa pembelajaran daring memiliki beberapa kendala, diantaranya keterbatasan fasilitas penunjang kelancaran pembelajaran daring berupa internet dan perangkatnya seperti *handphone* dan laptop yang tidak dimiliki oleh semua mahasiswa. Kendala berikutnya ialah kurangnya kemampuan untuk menguasai teknologi yang dialami oleh mahasiswa maupun tenaga pendidik, di samping itu, rasa bosan yang dialami oleh mahasiswa dan dosen terhadap pembelajaran daring ini¹¹.

Hal senada juga diutarakan oleh dosen psikologi Universitas Brawijaya, Ari Pratiwi. Dosen sekaligus psikolog Universitas Brawijaya tersebut menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi saat perkuliahan daring seperti yang dilansir di *website* Republika. Ari Pratiwi menjelaskan kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dan dosen berupa kesulitan dalam mendapatkan internet bagi mahasiswa dan juga dosen dalam melaksanakan perkuliahan dari rumah, sehingga mahasiswa mengalami kesulitan mendapatkan materi kuliah terlebih lagi banyaknya tugas yang menumpuk dan tidak sebanding dengan pemaparan materi oleh dosen. Hal tersebut mengakibatkan kendala yang kedua yaitu mahasiswa mengalami kecemasan, *overthinking*, stres, dan merasa tertekan dari adanya pembelajaran daring belum lagi ditambah permasalahan keluarga mahasiswa yang ekonominya mengalami penurunan

¹⁰ Farasonalia, "Curhat Siswa Di Jateng Soal Belajar Daring, Mulai Sulit Sinyal Hingga Tak Ada Kuota."

¹¹ Kompasiana, "Pembelajaran Daring Dan Kurikulum Era Pandemi Dalam Perspektif Michael W Apple."

penghasilan akibat adanya pandemi. Hal tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran mahasiswa selama perkuliahan daring ¹².

Universitas Airlangga juga terkena dampak dari adanya pandemi, khususnya kegiatan belajar mengajar di kampus. Menanggapi hal tersebut, Universitas Airlangga membuat surat edaran yang bernomor 736/UN3/HK/2020 dan kemudian diteruskan oleh ke semua fakultas. Salah satu fakultas yang menjadi bagian dari Universitas Airlangga adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh.

FISIP merupakan fakultas yang memiliki bidang keilmuan sosial serta mampu melahirkan mahasiswa yang berpikir kritis, dan bijak dalam menghadapi isu-isu sosial .¹³ Di samping itu, FISIP Universitas Airlangga secara otomatis juga menerapkan pembelajaran daring karena adanya pandemi Covid-19, hal tersebut menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti. Lalu, sikap FISIP Universitas Airlangga dalam menanggapi persoalan pembelajaran daring adalah dengan memutuskan yang ditandai dengan adanya terusan dari fakultas berupa surat edaran tanggal 15 Maret 2020 tentang tata laksana proses belajar mengajar dalam mencegah penularan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Dekan FISIP. Isi dari surat edaran tersebut yakni:

¹² Republika, "Empat Masalah Yang Timbul Akibat Kuliah Daring."

¹³ Airlangga, "FISIP Perkenalkan Diri Sebagai Kampus Pergerakan Dan Inklusif Dalam AEE 2021."

Tabel 1.3 Surat Edaran 15 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dalam Mencegah Penularan Covid-19

No.	Isi
1.	Pelaksanaan ujian tengah semester (UTS) dilakukan secara daring dari tanggal 16-27 Maret 2020, baik program S1, maupun S2.
2.	Seluruh sivitas akademika, mahasiswa, dan dosen melaksanakan proses belajar mengajar, seperti kegiatan belajar mengajar, magang, dan lain sebagainya secara daring dan memanfaatkan fasilitas daring dengan semaksimal mungkin guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 .
3.	Penundaan kegiatan-kegiatan seperti ujian skripsi, magang, disertasi, dan lain sebagainya atau dilaksanakan secara luring namun tetap memerhatikan kewaspadaan dan meminimalisir kontak langsung.
4.	Kegiatan belajar mengajar dalam bentuk praktik ditunda atau dengan alternatif pembelajaran yang lain.
5.	Seminar, diskusi, dan kegiatan semacamnya dilakukan dengan bentuk lainnya yang tidak membuat kontak fisik langsung
6.	Pelayanan akademik ataupun administrasi tetap berjalan dengan memanfaatkan media komunikasi seperti <i>cyber</i> , Whatsapp, dan lain-lain.
7.	Segala bentuk pembelajaran yang terdapat kegiatan keluar negeri untuk ditunda dan dilakukan dengan cara lain.
8.	Kegiatan akademik yang mengadakan perjalanan ke luar kota dan dinilai kurang penting untuk ditunda
9.	Semua warga FISIP dihimbau untuk menjalankan pola hidup sehat seperti anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
10.	Kebijakan yang diterapkan oleh fakultas bersifat fleksibel sesuai kondisi.
11.	Informasi lebih lanjut ataupun pelampiran dokumen, kebijakan, protokol kesehatan, dan lain sebagainya akan diinformasikan melalui website FISIP Unair.

sumber: Surat Edaran Dekan FISIP .¹⁴

¹⁴ Unair et al., "Dekan FISIP Unair Mengeluarkan Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Dalam Pencegahan Penularan COVID-19."

Sudah lebih dari dua tahun, FISIP menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring berkaca terhadap Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19 yang menghimbau setiap walikota dan gubernur di Indonesia untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah dan memberhentikan beberapa kegiatan seperti ujian nasional dan ujian sekolah.¹⁵ Sejak pemberlakuan kebijakan PPKM pada bulan Maret 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga menerapkan seluruh kegiatan dari rumah dimana pada tahun 2020 tersebut mahasiswa masih melaksanakan Ujian Tengah Semester atau UTS dan karena tuntutan peraturan yang mengharuskan melakukan perkuliahan secara daring, kegiatan UTS tersebut dilakukan secara daring menggunakan *platform* AULA UNAIR. Setelah selesai kegiatan Ujian Tengah Semester, kegiatan perkuliahan termasuk ujian dan bimbingan skripsi dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom. Di samping itu, segala kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan wajib diberhentikan dan dialihkan kegiatan tersebut ke aplikasi Zoom, sehingga memaksimalkan himbauan berkegiatan dari rumah dan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga tentu mengindahkan surat edaran tersebut dan segera membuat surat edaran Dekan FISIP Unair seperti pada tabel 1.3. Adapun saat itu mahasiswa dengan empat jenjang angkatan melakukan pembelajaran daring, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 3829 mahasiswa.

¹⁵ MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, "SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)."

**Tabel 1.4 Jumlah Mahasiswa Aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga Tingkat S1**

Program Studi	Angkatan					Total S1
	2017	2018	2019	2020	2021	
Administrasi Publik	114 (2,97%)	116 (3,02%)	126 (3,29%)	124 (3,23%)	119 (3,10%)	599 (15,64%)
Ilmu Politik	89 (2,32%)	98 (2,55%)	90 (2,35%)	101 (2,63%)	111 (2,89%)	489 (12,77%)
Sosiologi	97 (2,53%)	99 (2,58%)	98 (2,55%)	104 (2,71%)	121 (3,16%)	519 (13,55%)
Hubungan Internasional	95 (2,48%)	104 (2,71%)	118 (3,08%)	120 (3,13%)	139 (3,63%)	576 (15,04%)
Antropologi	98 (2,55%)	96 (2,50%)	103 (2,68%)	104 (2,71%)	111 (2,89%)	512 (13,37%)
Ilmu Informasi & Perpustakaan	88 (2,29%)	96 (2,50%)	106 (2,76%)	105 (2,74%)	121 (3,16%)	516 (13,47%)
Ilmu Komunikasi	102 (2,66%)	112 (2,92%)	122 (3,18%)	131 (3,42%)	151 (3,94%)	618 (16,13%)
Jumlah	683 (17,83%)	721 (18,82%)	763 (19,92%)	789 (20,60%)	873 (22,79%)	3.829 (100%)

Sumber: Kemahasiswaan FISIP Unair (diolah oleh peneliti) tahun 2021

Jumlah mahasiswa FISIP Unair tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan pada *level* angkatan maupun jurusan. Untuk jumlah mahasiswa aktif, FISIP Universitas Airlangga memiliki jumlah hampir 4.000 mahasiswa. Program studi Administrasi Publik mempunyai jumlah mahasiswa sebanyak 599 mahasiswa dengan persentase 15,64% dari total mahasiswa FISIP yang ada. Kemudian, program studi Ilmu Politik memiliki jumlah mahasiswa 489 mahasiswa dengan persentase 12,77%. Program studi ketiga ialah Sosiologi dengan jumlah mahasiswa 519 memiliki persentase sebesar 13,55%. Keempat ialah program studi Hubungan Internasional dengan jumlah mahasiswa 576 serta persentase 15,04%. Kemudian untuk program studi Antropologi memiliki jumlah mahasiswa 512 dengan persentase 13,37%, tak jauh berbeda dengan program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan yang sebanyak 516 dengan persentase sebesar 13,47%. Dan yang terakhir yaitu program studi Ilmu Komunikasi yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak yakni 618 mahasiswa dengan persentase sebesar 16,13%.

Pembelajaran daring menjadi pembahasan yang cukup penting mengingat saat ini masih dalam keadaan pandemi dan termasuk ke dalam pendidikan yang merupakan bagian dari tujuh belas tujuan *Sustainable Development Goals* atau SDGs. Hogwood (1990) mengemukakan suatu kebijakan ataupun program tidak hanya melihat dan berakhir pada penerapannya saja, akan tetapi juga memerhatikan dampak yang akan ditimbulkan, baik seperti apa yang diharapkan, ataupun yang tidak diharapkan. Evaluasi kebijakan harus dilakukan melihat terjadi adanya perbedaan hasil dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan harus sangat berfokus pada dampak dari program tersebut.

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu (*Research Gap*)

No.	Judul Jurnal	Analisis Jurnal
1	<i>“Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19”</i>	Penelitian yang diteliti Luh Devi Herliandry (2020) dan kawan-kawan, menjelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media-media belajar <i>online</i> yang tersedia, menjadi solusi di tengah pandemi Covid-19 yang sedang mewabah. Namun demikian, kebijakan mengenai pembelajaran jarak jauh ini perlu dievaluasi mengingat banyak sekali ditemukan bahwa masih banyak orang tua yang dinilai kurang sanggup untuk memberikan fasilitas terhadap peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran daring walaupun pembelajaran daring itu sendiri merupakan cara yang paling baik di masa pandemi ini, dan yang terpenting dari pembelajaran daring ialah dapat memaksimalkan kemampuan serta kreativitas peserta didik tersebut. ¹⁶
2	<i>“Dampak Covid-19 Terhadap Kegiatan Pembelajaran Online di Sebuah Perguruan Tinggi”</i>	Kemudian penelitian kedua yang dilakukan oleh Ericha Windhiyana Pratiwi (2020) mendeskripsikan tentang kegiatan pembelajaran daring di Universitas Kristen

¹⁶ Herliandry and Suban, “Jurnal Teknologi Pendidikan Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19.”

	<i>Kristen di Indonesia”</i>	Satya Wacana, Salatiga. Berdasarkan penelitian tersebut, pembelajaran daring yang telah dilakukan dianggap sudah berjalan secara fleksibel karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan <i>platform</i> aplikasi <i>Zoom</i> , <i>Schoology</i> , dan lain-lain. Walaupun demikian, masih terdapat kendala seperti masalah koneksi yang tidak memadai dalam pelaksanaan pembelajaran daring tersebut . ¹⁷
3	<i>“Problematika Pembelajaran Daring dalam Pespektif Mahasiswa”</i>	Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Arif Widodo dan Nursaptini (2020) mengungkapkan bahwa banyak permasalahan yang dialami oleh mahasiswa dalam pembelajaran daring, seperti contoh koneksi internet yang lambat, keterbatasan kuota internet yang dimiliki, tidak fokus dalam melaksanakan pembelajaran daring, metode dosen yang tidak dapat diikuti oleh mahasiswa, dan lain-lain. Dengan permasalahan tersebut, pembelajaran daring harus dievaluasi, seperti evaluasi terhadap media pembelajarannya, metode dosen, dan lain-lain, ditambah lagi ditemukan pendapat bahwa mahasiswa mengharapkan

¹⁷ Pratiwi, “DAMPAK COVID-19 TERHADAP KEGIATAN PEMBELAJARAN ONLINE DI SEBUAH PERGURUAN TINGGI KRISTEN DI INDONESIA Ericha Windhiyana Pratiwi Universitas Kristen Satya Wacana THE IMPACT OF COVID-19 ON ONLINE LEARNING ACTIVITIES OF A.”

		pembelajaran daring ditiadakan dan kembali seperti sedia kala . ¹⁸
4	<i>“Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19”</i>	Riset yang dilakukan Sulia Ningsih (2020) menjelaskan bahwa 100% mahasiswa Universitas Baturaja mengikuti pembelajaran daring selama masa semester genap 2019/2020. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa, mahasiswa Universitas Baturaja melaksanakan kuliah daring menggunakan media seperti <i>Zoom</i> , <i>Whatsapp</i> , <i>Edmodo</i> , dan lain sebagainya. Dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa 93,5% mahasiswa lebih menyukai pembelajaran secara tatap muka atau langsung karena terbatasnya kuota internet yang dimiliki oleh mahasiswa dan kuliah daring membuat interaksi antara mahasiswa dengan yang lainnya menjadi minim . ¹⁹
5	<i>“Kendala Pembelajaran Daring Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara”</i>	Penelitian kelima yang dilakukan oleh Henry Aditia Rigianti (2020) menerangkan bahwa pembelajaran daring di kabupaten Banjarnegara mengalami beberapa kendala, diantaranya ialah pelaksanaan pembelajaran daring yang kurang maksimal ditandai dengan ketidaksiapan dan ketidakmampuan

¹⁸ Widodo, “PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN DARING DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA.”

¹⁹ Ningsih, “PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PEMBELAJARAN DARING SELAMA PANDEMI COVID-19.”

		guru-guru dalam menggunakan aplikasi pembelajaran daring karena dinas pendidikan setempat belum melakukan pelatihan mengenai penggunaan aplikasi pembelajaran daring. Kemudian yang kedua ialah minimnya akses jaringan internet karena letak geografis kabupaten Banjarnegara dan mereka para guru dan lainnya tinggal di daerah dataran tinggi. Kendala yang ketiga adalah pengelolaan pembelajaran yang sulit dimana para guru mengalami kesulitan dalam melihat pencapaian kemampuan dasar murid. Dan yang keempat ialah kesukaran dalam penilaian pembelajaran yang mana penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik sulit dinilai secara obyektif. Dan yang terakhir adalah pengawasan yang kurang, para guru dan orang tua tentu menjadi kunci utama dalam mengawasi perkembangan siswa pada pembelajaran daring, sering terjadinya hubungan satu arah membuat para guru kesulitan dalam mengawasi siswa saat diberikan tugas .²⁰
6	<i>“Pelaksanaan Pembelajaran Daring</i>	Riset yang dilakukan oleh Tya Ayu Pransiska Dewi menghasilkan pembahasan

²⁰ Rigianti, “KENDALA PEMBELAJARAN DARING GURU SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN BANJARNEGARA.”

	<i>Masa Pandemi Covid-19”</i>	mengenai problematika pelaksanaan pembelajaran daring. Ditemukan beberapa permasalahan pelaksanaan pembelajaran daring di SMA N 1 Grobogan diantaranya seperti keterbatasan kemampuan dalam memfasilitasi penyampaian materi tenaga pendidik kepada peserta didik yang hanya memiliki grup Whatsapp. Permasalahan kedua adalah ketidakstabilan jaringan yang dialami. Di samping itu, keaktifan peserta didik dalam mengikuti kelas sangat minim.
7	<i>“Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19”</i>	Penelitian ketujuh dilakukan oleh Ordekoria Saragih dan kawan-kawan membahas mengenai hasil dari apa yang dialami oleh mahasiswa Universitas Sari Mutiara Indonesia dan ditemukan persepsi mahasiswa yang berpendapat bahwa perkuliahan daring sulit dilaksanakan karena susah nya mahasiswa untuk mendapatkan sinyal dan perangkat belajar yang dimiliki oleh mahasiswa sangat terbatas. Kemudian mahasiswa banyak yang susah untuk mencerna materi yang diberikan oleh dosen karena metode mengajar yang tidak komprehensif dan prasarana pembelajaran yang sulit diakses mahasiswa.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena pada penelitian ini mengidentifikasi kebijakan pembelajaran daring dan evaluasi kebijakan yang memfokuskan perbandingan sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan pembelajaran daring khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di samping itu, penelitian ini mengevaluasi kebijakan pembelajaran daring di FISIP agar dapat berjalan secara maksimal sebab adapun tujuan dari adanya pembelajaran daring ini seperti yang tertera pada Surat Edaran Dekan Nomor 1747/UN3.1.7/PK/2020 untuk membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, akan tetapi tetap melaksanakan perkuliahan dari rumah, walaupun masih banyak sekali tantangan yang dihadapi.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah seperti yang dijabarkan diatas, peneliti mendapatkan rumusan masalah yang dapat dijadikan pertanyaan penelitian dan pembahasan yakni bagaimana Evaluasi Kebijakan Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai panduan ataupun dasar seorang peneliti agar jawaban tidak melenceng jauh dari topik penelitian yang mana tujuan tersebut adalah untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dalam memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran daring dengan kendala yang dihadapi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini terdiri dari dua manfaat, yakni manfaat akademis dan manfaat praktis

1.4.1 Manfaat Akademis

Berkaca pada *research gap* penelitian ini yang mana terdiri studi-studi terdahulu, penulis atau peneliti memberikan suatu perbedaan dimana pada penelitian

ini peneliti berusaha untuk menjelaskan bagaimana dinamika pembelajaran daring sehingga apa saja yang sekiranya dapat dievaluasi dari adanya pembelajaran daring beserta kendala-kendalanya di samping juga melihat adanya subsidi kuota yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dengan tujuan agar peserta didik FISIP Universitas Airlangga yang tidak memiliki kuota internet yang cukup tetap bisa mengikuti pembelajaran daring menggunakan evaluasi kebijakan yakni evaluasi formatif. Peneliti berharap dari adanya penelitian yang dilakukan ini, mampu memberikan referensi tambahan terhadap masyarakat, baik kaum akademisi, maupun lainnya yang hendak mencari bahan bacaan mengenai evaluasi kebijakan pembelajaran daring di tingkat perguruan tinggi atau yang lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Di samping manfaat akademis yang telah dijelaskan sebelumnya, manfaat praktis yang peneliti harapkan ialah, penelitian ini mampu memberikan kontribusi berupa bahan pertimbangan ataupun evaluasi kepada para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, masyarakat (kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan), dan seluruh lembaga pendidikan sebagai alat acuan untuk meningkatkan peran masing-masing aktor yang terlibat guna menyukkseskan pembelajaran daring di masa pandemi agar memutus rantai penyebaran virus Covid-19 dan apabila dapat terus diimplementasikan, pembelajaran daring ini akan dapat terus dilanjutkan sesuai dengan teori *Sustainable Development Goals*. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan benar-benar menjadi pembelajaran dikalangan tersebut agar pembelajaran daring ini berguna dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir orang saja.

1.5 Landasan Teori

Dalam buku yang berjudul “*Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches*” tulisan William Lawrence Neuman, menjelaskan bahwa sebuah teori dapat memudahkan seseorang atau peneliti melakukan perluasan

pemahamannya perihal kompleksitas fenomena yang terjadi .²¹ Kemudian John W. Cresswell (2017) mengemukakan bahwa teori adalah suatu rangkaian yang terdiri dari dalil serta definisi dan itu semua saling berkesinambungan dan kemudian melahirkan sebuah gagasan untuk menjawab fenomena sosial yang terjadi.

Terdapat serangkaian konsep yang peneliti jadikan landasan berpikir dimuat ke dalam beberapa sub-bab. Sub-bab pertama yakni kebijakan publik yang menjelaskan mengenai proses kebijakan publik. Setelah itu, sub-bab yang kedua menjelaskan tentang evaluasi kebijakan publik, meliputi definisi evaluasi, kriteria evaluasi, tujuan evaluasi, dan fungsi evaluasi. Dan yang terakhir adalah sub-bab mengenai Kebijakan Pembelajaran Daring itu sendiri meliputi prinsip pembelajaran daring beserta karakteristiknya.

1.5.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Kebijakan-kebijakan publik dapat ditemukan dalam bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, pertanian, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri dan lain sebagainya. Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dan mengapa mereka melakukannya. Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang mampu mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan.

Pendapat lain dari Carl Friedrich memberikan definisi kebijakan publik “sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan yang diusulkan tersebut dapat mengatasi dan mencapai tujuan yang dimaksud”. Kebijakan publik memiliki

²¹ Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*.

tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama guna mencapai tujuan (visi dan misi) yang telah disepakati, dengan kata lain kebijakan publik merupakan jalan untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

Menurut Andorson kebijakan publik juga memiliki beberapa sifat, yaitu:²¹

a. Policy Demand

Permintaan yang dibuat oleh masyarakat baik secara individu/kelompok kepada pemerintah melalui saluran-saluran yang telah disediakan karena adanya masalah yang mereka rasakan. Permintaan tersebut bisa berupa tuntutan, tekanan atau desakan publik kepada pemerintah.

b. Policy Decisions

Putusan yang dibuat oleh pejabat publik dari beberapa alternatif kebijakan yang telah disediakan dan dikaji secara mendalam untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

c. Policy Statements

Pernyataan secara formal dari keputusan politik yang telah ditetapkan, yang meliputi ketetapan legislatif, dekrit dan perintah eksekutif, peraturan administratif, pendapat pengadilan, dan lain sebagainya.

d. Policy Output

Hasil akhir atau perwujudan nyata dari kebijakan publik di mana pemerintah harus mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

e. Policy Outcomes

Konsekuensi kebijakan yang diterima oleh masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, berasal dari apa yang dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah usaha atau tindakan, keputusan, dan strategi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat.

1.5.1.1 Proses Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye, proses kebijakan publik mencakup beberapa hal, diantaranya:

1. Identifikasi Masalah Kebijakan (Identification of Policy Problem)

Identifikasi masalah dalam kebijakan publik yakni para pembuat kebijakan harus paham dan teliti dalam mengenali dan mendefinisikan permasalahan, sebab hal tersebut merupakan langkah fundamental dan krusial dalam perumusan kebijakan yang baik. Permasalahan publik harus benar-benar dipahami dan didefinisikan dengan baik karena pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui apa yang menjadi tuntutan (*demands*) oleh masyarakat atas tindakan pemerintah terhadap suatu permasalahan.²³

2. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Penyusunan agenda merupakan tahap lanjutan dari identifikasi masalah yang sebelumnya telah dijelaskan. Dalam penyusunan agenda memutuskan hal yang akan menjadi masalah jauh lebih penting daripada membuat solusinya. Pejabat pemerintahan membuka akses komunikasi terhadap masyarakat, kelompok dan individu agar bisa memberikan kritik dan saran terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.²⁴ Pada penyusunan agenda dapat dilakukan dengan melalui *agenda setting from the bottom up*²⁵, *agenda setting from the top down*²⁶, *agenda setting from the mass media*.²⁷

3. Perumusan kebijakan (Policy Formulation)

Perumusan kebijakan adalah pengembangan alternatif kebijakan untuk menangani masalah pada agenda publik. Perumusan kebijakan terjadi di

birokrasi pemerintah, kelompok kepentingan, legislatif dan organisasi. Detail proposal kebijakan biasanya dirumuskan oleh staf anggota bukan oleh seorang pimpinan, akan tetapi staf dipandu oleh pemimpin mereka ketika merumuskan kebijakan.²⁸

4. Pengesahan kebijakan (*Legitimizing of Policies*)

Setelah dilakukan perumusan kebijakan yang didalamnya merupakan pilihan dari alternatif-alternatif yang ditawarkan, maka tahap selanjutnya adalah pengesahan kebijakan tersebut. Pengesahan kebijakan dilakukan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres. Pengesahan kebijakan ini menjadi tahapan awal dalam pembentukan kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan atau suatu kebijakan telah memiliki (*legal standing*) kedudukan kuat karena telah mendapatkan pengesahan dari para pemegang kewenangan.²⁹

5. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*)

Implementasi melibatkan semua kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi merekrut personil, menyusun kontrak, menggunakan dana yang disediakan dan melakukan tugas. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang digunakan atau dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Karena itu baik tidaknya kebijakan dapat dilihat pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan.³⁰

6. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan adalah langkah terakhir dalam pembuatan kebijakan. Pembuat kebijakan harus mengetahui apakah kebijakan yang telah dibuat dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak. Selain itu evaluasi kebijakan ini dapat digunakan sebagai "umpan balik". Maksudnya evaluasi kebijakan saat ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah baru dan menjadikannya sebagai

proses pembuatan kebijakan sekali lagi atau yang baru.

1.5.2 Evaluasi Kebijakan

1.5.2.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi kebijakan adalah sebuah kegiatan melakukan penilaian terhadap kebijakan yang diterapkan. Menurut Anderson (1975), kebijakan tersebut pada dasarnya mencakup pengimplementasian, dampak, dan substansi. Dalam evaluasi kebijakan tersebut, evaluasi kebijakan memberikan informasi yang kredibel terhadap suatu kriteria dalam kebijakan. Dengan demikian, evaluasi mampu memberikan penilaian mengenai seberapa jauh keefektifan kebijakan telah diterapkan ditandai dengan pencapaian target. Kemudian evaluasi kebijakan dapat memberikan sumbangan ide terhadap analisis kebijakan yang di dalamnya terdapat rekomendasi serta perumusan masalah.

1.5.2.2 Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik

William Dunn (2003) mengemukakan bahwa ada tiga pendekatan dalam mengevaluasi suatu kebijakan yang telah diterapkan, yakni:

1. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*),

Pendekatan evaluasi ini merupakan sebuah pendekatan yang mengharuskan evaluasi dilakukan dengan menggunakan parameter atau tolak ukur yang telah disepakati (konsensus) secara bersama-sama bertujuan agar evaluasi menghasilkan sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat luas dan hasilnya berupa keberhasilan atau kegagalan

2. Evaluasi Formal

Evaluasi formal adalah sebuah pendekatan yang berpandangan bahwa kebijakan publik yang diterapkan dengan maksud tujuan dan sasaran kelompok yang hendak dituju harus tepat sesuai dengan nilai ataupun manfaat yang ditandai dengan

adanya pengukuran berdasarkan parameter kebijakan yang formal dan memiliki landasan hukum atau dokumen yang sah.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision Theoritic Evaluation*)

Pendekatan evaluasi teoritis adalah pendekatan yang dilakukan menggunakan tolak ukur yang telah disetujui bersama-sama (konsensus) yang berkaitan langsung dengan program yang sedang diimplementasikan, pendekatan ini mengacu terhadap sesuatu yang dianggap benar atau salah

1.5.2.3 Kriteria dalam Evaluasi

Dalam mengevaluasi sebuah dampak pada kebijakan atau suatu program, diperlukan sebuah kriteria yang harus digunakan untuk mengukur sebuah program apakah sudah dapat dikatakan berhasil. William Dunn menjelaskan di dalam bukunya terdapat enam kriteria dalam melakukan evaluasi suatu kebijakan, diantaranya:

a. Keefektifan (*effectiveness*)

Pada kriteria ini, evaluasi dilihat dari apakah suatu program yang telah diterapkan telah mencapai hasil yang sebelumnya sudah disepakati atau dengan istilah lainnya, apakah program tersebut sudah mencapai hasil sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan. Biasanya, pengukuran kriteria keefektifan ini didasari oleh produksi unit, program layanan jasa, serta nilai-nilai keuangannya, sebab rasionalisasi ini sangat berhubungan dengan teknis.

Kriteria keefektifan ini dapat disimpulkan bahwa keefektifan dapat dijadikan penilaian terhadap Pembelajaran Daring yang diterapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam upaya memaksimalkan pembelajaran yang diterapkan

b. Efisiensi (*efficiency*)

Untuk mengevaluasi di kriteria ini, dapat digunakan sebagai acuan dalam menjawab sebuah pertanyaan seberapa banyakkah usaha yang diperlukan oleh

evaluator untuk mencapai suatu tujuan dari program yang telah diterapkan. Dengan demikian, sebuah program dapat dikatakan efisien dilihat dari usaha yang digunakan. Efisien dalam perspektif ekonomi juga dapat dilihat dari biaya atau anggaran yang telah digunakan untuk memberikan pelayanan atau sebuah produk. Suatu program dapat dikatakan efisien apabila sudah mencapai keefektifan yang maksimal tetapi menggunakan biaya atau *cost* seminimal mungkin. Untuk penelitian ini, efisiensi program dapat diukur melalui seberapa jauh capaian yang telah diperoleh dengan usaha yang telah dikeluarkan.

c. Kecukupan (*adequacy*)

Kriteria kecukupan atau *adequacy* merujuk terhadap pemenuhan kebutuhan seperti kesempatan para *stakeholder* dalam perannya memecahkan permasalahan dengan nilai yang ada. Dengan kata lain, *adequacy* menekankan terhadap pilihan alternatif pada program dengan hasil yang sudah disepakati sebelumnya. Penerapan *adequacy* terhadap pelaksanaan pembelajaran daring yaitu menjawab pertanyaan bagaimana penerapan Pembelajaran Daring dengan aspek ekonomi atau sumber daya yang tersedia.

d. Perataan (*equity*)

Kriteria Perataan atau dengan istilah lainnya pemerataan merujuk kepada peran program atau kebijakan dalam menjangkau kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kriteria ini lebih menekankan pada pendistribusian kebijakan yang menyeluruh dengan prinsip keadilan. Rasionalisasi terhadap penelitian ini merujuk terhadap bagaimana partisipasi kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dengan kebijakan pembelajaran daring di FISIP Unair.

e. Responsivitas (*responsiveness*)

Tahapan kriteria ini lebih menekankan terhadap sebuah pertanyaan yang mana mengukur seberapa jauh pencapaian suatu kebijakan atau program dapat memenuhi

kebutuhan nilai pada kelompok masyarakat. Apabila kriteria yang sebelumnya dinilai tidak dapat memberikan kepastian perihal kepuasan masyarakat jika tidak diikutsertakan tahapan kriteria responsivitas. Pada penelitian ini, tanggapan kelompok masyarakat di FISIP Unair terhadap pelaksanaan pembelajaran daring sangat penting untuk menilai apakah program tersebut dapat dinilai berhasil.

f. Ketepatan (*appropriateness*)

Untuk tahapan kriteria terakhir ini, sangat erat hubungannya dengan kelayakan atau ketepatan sebuah kebijakan terhadap individu. Tolak ukur ketepatan ini didasari oleh sebuah nilai, *cost*, serta tujuan dari adanya suatu program dengan kerangka suatu program kerja. Hal ini tak dapat diaplikasikan dengan cara sangat baku, sebab dapat keluar dari aspek atau kriteria yang sudah ada. Oleh karena itu, harus diikutsertakan kriteria-kriteria seperti efisiensi, keefektifan, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, pelaksanaan pembelajaran daring sudah menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dan apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

1.5.2.4 Tujuan Evaluasi

Subarsono (2011:120-121) menjelaskan mengenai apa maksud dan tujuan evaluasi dilakukan diantaranya:

1. Evaluasi merupakan sebuah instrumen yang berguna untuk memperbaiki sebuah kebijakan yang sedang berjalan baik kebijakan berupa program atau yang lainnya. Kemudian daripada itu, dapat diperoleh sebuah masukan berupa data atau informasi terkait kemungkinan apa saja yang akan terjadi dari sebuah pelaksanaan kebijakan tersebut yang tentunya dapat dijadikan sebuah dasar untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan dari implementasi program tersebut

2. Evaluasi juga dapat dijadikan sebuah alat untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif agar tidak terjadi pemborosan saat pelaksanaan program dimasa yang akan datang
3. Evaluasi dapat menjadi sebuah alat untuk memperbaiki program yang mana di dalamnya terdapat perencanaan dan pengimplementasian agar hubungan antara program dan lingkungan sekitar dapat dimonitoring secara pasti.

1.5.2.5 Fungsi Evaluasi

Terkait dari adanya evaluasi kebijakan publik, evaluasi berfungsi sebagai tahapan terakhir dari berbagai macam proses formulasi kebijakan dan menghasilkan sebuah alternatif yang memiliki sifat kredibel, akuntabel, dan tentunya valid. Dun dan Ripley mengemukakan sekiranya terdapat empat fungsi sebuah evaluasi kebijakan publik, yaitu:

1. Fungsi Eksplanasi, berfungsi mendeskripsikan secara rinci gambaran dari adanya suatu program atau kebijakan beserta gambaran umumnya yang memiliki pola hubungan kenyataan dan teori.
2. Fungsi Kepatuhan, merupakan sebuah alat untuk melihat apakah pelaksanaan sebuah kebijakan publik diimplementasikan dengan prosedur yang jelas dan standar yang telah disepakati
3. Fungsi *Auditing*, merupakan sebuah tolak ukur sebuah kebijakan yang mengaudit hasil atau *output* telah meraih apa yang telah direncanakan awalnya
4. Fungsi Akunting, fungsi ini digunakan untuk mengetahui dampak apa yang sekiranya terpengaruh dari adanya kebijakan ini baik dampak sosial, maupun ekonomi.

1.5.2.6 Jenis Evaluasi

Pada dasarnya, evaluasi itu sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yakni:

1. Evaluasi pada tahap perencanaan

Kata “evaluasi” sering digunakan dalam tahap perencanaan yaitu dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam perencanaan, metode-metode yang ditempuh tidak selalu sama, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan dan permasalahan yang dihadapi.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini, evaluasi adalah suatu kegiatan melakukan analisis untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara evaluasi menurut pengertian ini dengan *monitoring*/pengendalian. *Monitoring* yaitu melihat apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan. Sedangkan, evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuannya, apakah tujuan tersebut sudah berubah, apakah pencapaian hasil proyek tersebut akan memecahkan masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi juga mempertimbangkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi keberhasilan proyek tersebut, baik membantu atau menghambat.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Disini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian pada tahap pelaksanaan, hanya perbedaannya yang dinilai dan dianalisa bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana, tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Wibawa menjelaskan ada 4 jenis evaluasi, yaitu:³⁷

- a. *Single Programme After Only*. Program tunggal setelah dilaksanakan yaitu evaluator hanya mendapatkan data atau keadaan kelompok sasaran program pada waktu program telah selesai. Sehingga analisis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program.
- b. *Single Programme Before After*. Program tunggal sebelum dan sesudah dilaksanakan yaitu memiliki data lebih lengkap mengenai sasaran program pada waktu sebelum dan sesudah program berlaku. Selain itu adanya perubahan pada kelompok sasaran saat sebelum dan sesudah program dilaksanakan.
- c. *Comparative After Only*. Perbandingan dua kelompok sesudah program dilaksanakan yaitu mengetahui keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol sesudah program.
- d. *Comparative Before After*. Perbandingan dua kelompok sebelum dan sesudah program dilaksanakan yaitu mengetahui dampak program terhadap kelompok sasaran dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah program dilaksanakan.

1.5.2.7 Desain Evaluasi

Menurut Carl V. Patton, terdapat 6 desain evaluasi kebijakan, yakni:

- a. *Before and after comparisons* (perbandingan antara sebelum dan sesudah). Karakteristik dari pendekatan jenis ini hanya berlaku untuk satu komunitas yang sama dengan membandingkan kondisi (masyarakat atau lokasi) sebelum dan sesudah adanya intervensi. Asumsi dari desain ini yaitu bahwa ada perbedaan antara data yang dikumpulkan sebelum implementasi dan setelah implementasi kebijakan atau program.
- b. *With and without comparisons* (perbandingan antara dengan atau tanpa intervensi). Karakteristik dari pendekatan jenis ini hanya berlaku untuk lebih dari satu komunitas dengan membandingkan antara komunitas yang diberi intervensi dengan

komunitas yang tidak diberi intervensi dalam waktu yang bersamaan. Asumsi yang tepat yaitu bahwa perubahan yang terjadi di dua lokasi berhubungan dengan kebijakan atau program.

c. *Actual vs planned performance comparisons* (pembandingan antara kenyataan dengan rencana). Karakteristik dari pendekatan jenis ini membandingkan antara rencana (sebelum pelaksanaan program) dengan kenyataan (setelah program) yang ada di lapangan (sesuai atau tidak). Evaluatur menetapkan tujuan spesifik dan target untuk kriteria evaluasi yang ditentukan sebelumnya untuk periode waktu yang diketahui, dan memperoleh data tentang kinerja yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, evaluatur membandingkan kinerja yang sebenarnya dengan kinerja target, dan mencari penjelasan yang masuk akal untuk perbedaan yang mungkin disebabkan oleh faktor program dan non program.

d. *Experimental (controlled) models*. Karakteristik dari pendekatan jenis ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkontrol atau dikendalikan untuk mengetahui kondisi yang diteliti. Desain eksperimental ini biasanya membuat perbandingan antara individu dalam kelompok yang dipilih secara acak, beberapa di antaranya dilayani oleh program dan beberapa yang tidak dilayani atau dilayani dengan cara lain. Kelompok pembandingan harus ditentukan sebelum pelaksanaan program, dan kelompok dibuat serupa melalui pemilihan dan penugasan acak.

e. *Quasi experimental (uncontrolled) models*. Karakteristik dari pendekatan ini berguna untuk evaluasi ketika eksperimen tidak dapat dilakukan, ketika tidak dapat memilih orang atau kelompok yang mendapat perlakuan dan dikontrol, ketika tidak dapat mengontrol administrasi program atau kebijakan atau membatasi kebijakan untuk kelompok perlakuan atau ketika program tidak ditujukan pada individu.

f. *Cost oriented approach* (efisiensi penggunaan dana). *Cost oriented approach* terbagi menjadi tiga yaitu *ex-ante evaluation* (evaluasi yang dilakukan sebelum

kegiatan dilaksanakan), *on-going evaluation* (evaluasi yang dilakukan saat kegiatan sedang berjalan), dan *ex-post evaluation* (evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan selesai). Desain evaluasi yang berorientasi pada biaya, pendekatan ini menilai kebijakan atau program dengan cara membandingkan biaya yang terpakai untuk sumber daya dengan kriteria tertentu.

1.5.3 Kebijakan Pembelajaran Daring

1.5.3.1 Pengertian Pembelajaran Daring

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang saat ini sedang populer dilakukannya akademisi yakni proses belajar mengajar yang dilakukan secara *online* atau jarak jauh tanpa adanya kontak fisik. Dogmen (Rahmawati, 2020:414) berpendapat bahwa pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menuntut para peserta didik untuk dapat belajar secara mandiri yang terorganisir secara sistematis dengan media pembelajaran seperti telepon, radio, televisi, internet, gawai, dan lain-lain yang menjembatannya tanpa adanya kontak secara langsung. (Yerusalem, dkk, 2020:483) menambahkan bahwa kegiatan pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan bukan di tempat semestinya atau dengan kata lain di luar tempat belajar mengajar. Masih pada Yerusalem, ragam proses yang terjadi saat pembelajaran daring meliputi lima hal, diantaranya:

- a. Membuat peserta didik menjadi lebih mandiri
- b. Kegiatan belajar mengajar terstruktur
- c. Adanya kontak dua arah antara pengajar dan yang diajar melalui media yang telah dijelaskan diatas
- d. Menggunakan media yang telah disediakan
- e. Alternatif media lainnya sebagai pendukung pembelajaran daring

1.5.3.2 Prinsip Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Terdapat delapan prinsip dan dua belas karakteristik pada pelaksanaan pembelajaran daring menurut Munir (2012: 24-25). Prinsip pertama ialah pelaksanaan pembelajaran daring harus memiliki tujuan dan arah yang jelas. Prinsip ini merujuk terhadap pelaksanaan pembelajaran daring harus dilakukan dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditentukan.

Prinsip yang kedua adalah pembelajaran daring ini harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan bagi mahasiswa dan tenaga pendidik. Prinsip ini mengacu pada urgensi pelaksanaan pembelajaran daring yang dilaksanakan melihat keadaan ataupun kondisi dari lingkungan pembelajaran daring tersebut apakah terdapat tuntutan yang mengharuskan pembelajaran daring ini harus diterapkan.

Prinsip ketiga adalah terdapat mutu pendidikan yang mencukupi. Prinsip ini mengarah terhadap sisi pengelolaan dan proses pendidikan yang ada dan didukung oleh beberapa faktor seperti ketersediaan prasarana dalam melaksanakan pembelajaran daring, tenaga pendidik, materi perkuliahan, kurikulum bagi pembelajaran, manajemen pembelajaran daring, dan keluarga yang mendukung agar tercapainya *output* secara maksimal

Prinsip keempat adalah kebijakan pembelajaran daring ini harus terlaksana secara efektif dan efisien. Prinsip tersebut mengacu terhadap pembelajaran daring ini harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan dilakukan dengan usaha yang seminimal mungkin dan mendapatkan hasil semaksimal mungkin dan terlaksana secara baik juga lancar.

Prinsip kelima ialah setiap individu, baik peserta didik, maupun tenaga pendidik mendapatkan kesempatan yang sama dalam melaksanakan pembelajaran daring. Prinsip ini mengartikan bahwa seluruh elemen yang melaksanakan pembelajaran daring dapat merasakan nilai dan manfaatnya, sehingga tidak ada individu yang tidak merasakan manfaat dari adanya perkuliahan daring.

Prinsip keenam adalah pembelajaran daring harus melahirkan kemandirian bagi peserta didik. Prinsip ini mengacu pada peserta didik dalam melakukan pembelajaran dari rumah harus mampu menjalankan dan manajemen pembelajaran daring secara mandiri, sehingga peserta didik mampu mengoperasikan pembelajaran daring ini dengan mandiri.

Prinsip ketujuh ialah pelaksanaan pembelajaran daring ini harus dilakukan secara terpadu antara peserta didik dan tenaga pendidik. Prinsip ini mengacu pada keselarasan kegiatan pembelajaran daring yang dilaksanakan, peserta didik dan tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran daring harus dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tema materi pembelajaran.

Dan prinsip yang terakhir adalah adanya kesinambungan pembelajaran bagi peserta didik dari tenaga pendidik. Prinsip ini mengartikan bahwa pembelajaran daring ini dilakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan yang artinya pembelajaran daring ini harus terlaksana secara terus menerus sesuai dengan alur dan peraturan yang telah ditetapkan.

1.5.3.3 Karakteristik Pembelajaran Daring

Dalam tinjauan yang berbeda, Munir (2012:25) menjelaskan terdapat beberapa ciri dalam pembelajaran daring. Karakteristik pertama adalah pembelajaran daring ini harus dilaksanakan tanpa adanya kontak fisik langsung, atau pembelajaran daring ini dilaksanakan tanpa adanya tatap muka antara peserta didik dan tenaga pendidik.

Ciri kedua ialah pembelajaran daring ini ialah adanya lembaga yang dapat memantau dan memonitoring jalannya pembelajaran daring. Ciri ini mengacu pada pelaksanaan pembelajaran daring dengan adanya badan ataupun lembaga yang melakukan pengawasan dan monitoring terhadap jalannya pembelajaran daring, sehingga pelaksanaannya dapat terkontrol sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Karakteristik ketiga adalah penggunaan media pembelajaran sebagai penunjang pelaksanaan pembelajaran daring. Pengertian dari karakteristik ini merujuk terhadap media yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran daring, media tersebut dapat berupa komputer dan gawai dengan dukungan internet untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran daring tersebut.

1.6 Definisi Konsep

Berdasarkan penjabaran konsep-konsep yang ada diatas, peneliti memberikan sebuah gambaran dari batasan apa saja terhadap fokus penelitian yang disajikan, antara lain:

1. Kebijakan Publik, adalah usaha atau tindakan, keputusan, dan strategi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat.
2. Evaluasi Kebijakan, adalah suatu penilaian terhadap perbandingan standar dan fakta, didukung dengan analisa hasilnya
3. Keefektifan (*Effectiveness*) merupakan sebuah hasil atau tujuan program yang sesuai dengan harapan.
4. Efisiensi (*efficiency*) adalah usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil atau tujuan program yang diharapkan
5. Kecukupan (*Adequacy*) adalah suatu program dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan pihak yang terlibat dalam program untuk memecahkan suatu masalah.
6. Kesamaan/pemerataan (*Equity*) merupakan kemampuan program dalam menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda.
7. Responsivitas (*Responsiveness*) adalah suatu program yang dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, pencapaian, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

8. Kelayakan/ketepatan (*Appropriateness*) yaitu hasil atau tujuan dari program benar-benar berguna dan dapat memberikan nilai untuk kelompok-sasarannya.

9. Kebijakan Pembelajaran daring, pembelajaran daring ialah kegiatan belajar mengajar yang memisahkan pengajar dan yang diajar, baik waktu, ruang, dan jarak.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dimana pada penelitian deskriptif kualitatif menurut Creswell (2017) peneliti berusaha untuk menganalisis atau memahami makna suatu kejadian, fenomena sosial, ataupun aktivitas sebuah kelompok sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi perbandingan antara perencanaan kebijakan pembelajaran daring dengan kondisi yang senyatanya terjadi di lapangan. Menggunakan jenis evaluasi formal, penelitian ini memiliki tujuan yang mendeskripsikan kondisi yang sedang terjadi di lapangan dengan tujuan yang direncanakan sesuai dengan regulasi yang ada.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Seperti yang tertulis di judul dan latar belakang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga akan menjadi lokasi penelitian yang hendak peneliti lakukan karena Universitas Airlangga merupakan perguruan tinggi negeri terbaik di Jawa Timur dan menempati urutan keempat di tingkat nasional. Di samping itu, FISIP merupakan kampus pergerakan yang mana mahasiswanya sangat kritis dengan isu-isu yang tengah berkembang.

1.7.3 Teknik Penentuan Informan

Pada teknik penentuan informan, peneliti akan menggunakan teknik *purposive* dan yang artinya penelitian hendak mencari informan akademik, dosen-dosen, dan mahasiswa FISIP Unair. Sebab, menurut Moleong (2010), informan merupakan orang

yang mampu memahami fenomena yang sedang terjadi. Adapun informan tersebut terdiri dari dua belas informan, yaitu:

Tabel 1.6 Nama-Nama Informan

No.	Nama Informan	Jabatan
1	Drs. Moch Anwari	Kepala Subbagian Akademik
2	Hendro Margono, S.Sos., M.Sc., Ph.D	Kepala Departemen Program Studi Ilmu Informasi & Perpustakaan
3	Helmy Prasetyo, S.Sos., M.KP.	Dosen Program Studi Ilmu Informasi & Perpustakaan
4	Rani Sukma Ayu Suteja, S.I.Kom., M.Sc	Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi
5	Linggar Rama Dian Putra, S.Ant., M.A.	Dosen Program Studi Antropologi
6	Drs. Sudarso, M.Si	Dosen Program Studi Sosiologi
7	Febby Risti Widjayanto, S.IP., M.Sc	Dosen Program Studi Ilmu Politik
8	Philipus Keban S.IP., M.Si	Dosen Program Studi Administrasi Publik
9	Citra Hennida, S.IP., MA (IR)	Dosen Program Studi Hubungan Internasional
10	Yoga Haryo Prayogo	Mahasiswa Sosiologi angkatan 2018
11	Daniel Kristoaji Prayogo	Mahasiswa Hubungan

		Internasional angkatan 2018
12	Christiana Permatasari	Mahasiswi Antropologi angkatan 2019 dan
13	Ngakan Made Cahaya Dwika Kusuma	Mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2019
14	Muhammad Daffa Ihsani	Mahasiswa Administrasi Publik angkatan 2020
15	Ghaly Dhiwa Maulana	Mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2020

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti hendak menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Cresswell (2017) berpendapat bahwa pada saat pelaksanaan pengumpulan data dapat diperoleh melalui, salah satunya wawancara dari lima cara pengumpulan data. Masih dengan Yin, menambahkan tiga proses saat menjalankan penelitian studi kasus, diantaranya:

1. membuat serta mendefinisikan penelitian, pada proses ini peneliti melakukan pengembangan teori terhadap kajian atau konsep untuk membuat mekanisme pengumpulan data
2. mempersiapkan, menganalisis, serta mengumpulkan data yang sebelumnya peneliti sudah merancang mekanisme penelitian sebelumnya.
3. Setelah mendapatkan hasil dari penelitian tersebut, peneliti berusaha untuk menganalisis data tersebut dan menyimpulkannya dengan tujuan memverifikasi ulang dan mencocokkan dengan konsep dan teori yang telah dibentuk sebelumnya.

1.7.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti untuk teknik pemeriksaan keabsahan data hendak menggunakan teknik Triangulasi data seperti yang dikemukakan oleh Cresswell (2017). Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan melalui sesuatu yang berada di luar data tersebut sebagai alat untuk verifikasi ataupun perbandingan terhadap data yang telah diperoleh. Cresswell (2017) berpendapat bahwa metode triangulasi dibagi menjadi dua strategi, yakni

1. Verifikasi derajat kepercayaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data
2. Verifikasi derajat kepercayaan dengan menggunakan metode yang sama

Dengan demikian, peneliti dapat menggunakan teknik triangulasi sebagai pembanding hasil wawancara yang telah didapati dari berbagai sumber untuk dicek kembali kebenaran informasi-informasi tersebut menggunakan teknik pengumpulan yang berbeda seperti observasi, dokumentasi, wawancara langsung dengan informan, dan dokumentasi.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan teknik pengumpulan data, peneliti hendak menggunakan teknik reduksi data. Cresswell (2017) berpendapat bahwa terdapat tiga alur analisis data, yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang terakhir kesimpulan. Reduksi data merupakan teknik analisis data yang mempertajam, mengkategorikan, merujuk, membuang data yang sekiranya kurang penting untuk dimasukkan ke dalam penelitian, serta menstrukturisasi data menjadi teratur sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang tentunya peneliti juga harus menganalisis sesuai dengan penelitian kualitatif.